

Judul : Bentuk panja KM Virgo, komisi V saran periksa kelaikan semua kapal
Tanggal : Jumat, 18 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bentuk Panja KM Virgo Komisi V Saran Periksa Kelaikan Semua Kapal

SENAYAN mendesak penundaan seluruh operasional kapal penumpang buntut insiden kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8. Penundaan itu dilakukan sampai ada kepastian kelaikan kapal berlayar. Demi keselamatan, semua jalur pelayaran penumpang perlu diperiksa.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan, pemeriksaan kelaikan kapal atau *ramp check* perlu dipastikan berjalan pada seluruh operator pelayaran. Kementerian Perhubungan (Kemhub) wajib mengevaluasi secara menyeluruh pemberian izin operasional kapal. Jika memang diperlukan, sanksi pencabutan izin bisa diterapkan tegas kepada kapal yang terbukti melanggar standar keselamatan serta pelayanan penumpang.

Tak cuma itu, operator kapal yang terbukti tidak memenuhi standar pelayanan, keselamatan, dan keamanan juga mesti ditindak tegas. Penindakannya tidak boleh sebatas sanksi administratif. "Pihak yang melanggar atau lalai wajib dijatuhi sanksi berat hingga pencabutan izin operasional armada kapal milik mereka," tegasnya, Rabu (15/9/2026).

Kemudian, Huda juga mendesak Kemhub menerapkan sistem terintegrasi terkait seluruh manifest kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia. Penerapan sistem terpadu itu

stafnya sangat mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Pengawasan akurasi data penumpang serta muatan kapal perlu dipastikan berjalan dengan lancar demi keselamatan bersama.

Dia menegaskan, sistem manifest terintegrasi itu wajib terealisasi tanpa penundaan atau negosiasi, dengan fokus utama pengawasan berada pada jajaran syahbandar, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seluruh Indonesia. "Perketat kinerja para petugas di lapangan agar tidak ada celah kelalaian dalam setiap pelayaran kapal," ucapnya.

Anggota Komisi V DPR Hamka B Kady menambahkan, Pemerintah perlu mengevaluasi regulasi serta pengawasan keselamatan kapal. Berulangnya kecelakaan pelayaran menunjukkan masih adanya masalah pada kelaiklauan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan akurasi manifest. Pengawasan muatan, koordinasi cuaca, hingga alat keselamatan juga bermasalah.

Hamka juga menyoroti usia KM Virgo Transport 8 yang dibuat di Jepang pada 1987 atau sekitar 39 tahun. Usia kapal memang tidak otomatis membuatnya tidak laik laut, tapi riwayat operasional wajib dipertimbangkan. "Kemhub wajib membuka hasil pemeriksaan kondisi aktual kapal di lapangan," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua



Syaiful Huda

Komisi V DPR Lasarus menegaskan, pihaknya akan membantuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas kecelakaan pelayaran ini. Panja dibentuk demi mengurai secara menyeluruh penyebab kecelakaan. Penyidikan mencakup aspek keselamatan pelayaran, sistem pengawasan kapal, hingga informasi cuaca sebelum kapal berlayar.

Salah satu yang jadi pertanyaan adalah keputusan tetap nekat berlayar saat kondisi cuaca buruk melanda perairan. Kepastian mengenai pembaruan informasi cuaca yang diterima nakhoda sebelum keberangkatan bakal diusut tuntas. "Seluruh data keterangan dan tindakan nakhoda selama pelayaran akan diperiksa secara menyeluruh oleh tim investigasi," terangnya. Panja, kata Lasarus, mem-

berikan ruang lebih luas untuk memanggil pihak terkait serta menggali keterangan mendalam. Karena nantinya kerja Panja tidak sekadar mencari penyebab kecelakaan kapal di laut. Hasil investigasi diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret sebagai bahan evaluasi perbaikan sistem keselamatan transportasi laut.

Komisi V DPR, sambungnya, bakal meminta penjelasan resmi Kemhub mengenai pengawasan kelaikan operasional kapal. Tidak hanya keterangan umum, DPR akan menelusuri akar permasalahan secara mendalam. "Penyelidikan secara mendalam bakal dilakukan guna membongkar seluruh kelemahan sistem keselamatan pelayaran yang ada saat ini," jelasnya.

Diketahui, KM Virgo Transport 8 terbalik dihantam gelombang tinggi pada Minggu (13/9/2026) di Perairan Laut Jawa dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Berdasarkan manifest, kapal itu membawa 243 orang dan 89 unit kendaraan. Manifest juga mencakup 30 kru, 27 mitra, 60 penumpang, dan 126 sopir.

Sebanyak 114 korban berhasil dievakuasi ke Banjarmasin dengan rincian 108 orang selamat dan enam meninggal dunia. Tim Disaster Victim Identification (DVI) Pusdokes Mabes Polri bergerak cepat mengidentifikasi

para korban jiwa. Identifikasi berlangsung lancar karena seluruh kondisi jenazah utuh saat diterima tim lapangan.

Manajemen PT Virgo Karya Shipping (VKS) Cabang Banjarmasin menyampaikan permohonan maaf dan duka cita pada keluarga korban. Perusahaan berkomitmen bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kebutuhan korban, termasuk menanggung penuh pembiayaan penanganan jenazah, pemulangan korban selamat, hingga pengantaran jenazah ke kampung halaman.

Saat ini, operasi pencarian korban terus berlangsung dan diperluas hingga perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Rabu, 16 September 2026. Penyisiran tim SAR diarahkan menuju sekitar Pulau Masalembu. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan adanya korban terombang-ambing arus laut ke perairan Jawa Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Muhammad Masyhud menegaskan, untuk pencarian korban pihaknya terus memperkuat koordinasi bersama seluruh unsur terkait. Ditjen Hubla mengoptimalkan seluruh dukungan armada untuk membantu proses penyisiran di laut. Keselamatan seluruh tim yang terlibat tetap jadi perhatian utama selama operasi pencarian. ■ PYB